

Revitalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah sebagai Upaya Mewujudkan Lingkungan Bebas Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek

M. Nasyith Tazaka¹, Moh Nurul Huda², A. Sofyan Ali³, Intan Nur Aini⁴, Cheril Hidayati Nurmala⁵, Titis Wulan Ramadhani⁶, Ine Febrianty⁷

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹⁻⁷



Email tazakanasyith@gmail.com , mohnurulhuda1968@gmail.com , alisofian281@gmail.com ,
xntxnr@gmail.com , cherilhidayatin@gmail.com , titisrimadhani@gmail.com ,
inefebrianti029@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 26-08-2026

Disetujui 03-09-2026

Diterbitkan 05-09-2026

Katakunci:

*Bank Sampah,
Pemberdayaan
Masyarakat, Pengelolaan
Sampah, Desa Jatiprahu*

ABSTRAK

Dusun/RT 17 Desa Jatiprahu, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, hingga saat ini belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai. Kondisi ini mendorong sebagian besar warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya secara langsung, sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan program pemerintah daerah terkait pengurangan emisi karbon. Permasalahan ini pertama kali teridentifikasi melalui laporan warga pada kolom komentar salah satu konten media sosial TikTok milik kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang mengeluhkan tidak adanya fasilitas pembuangan sampah di desa tersebut. Berdasarkan temuan ini, mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja unggulan berupa pembentukan Bank Sampah. Sebagai langkah awal, tim melakukan studi tiru ke Bank Sampah Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, yang telah berjalan bertahun-tahun dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warganya melalui skema tabungan sampah yang dapat ditukar dengan uang maupun emas. Dalam proses implementasinya, tim menghadapi kendala utama berupa ketiadaan lahan untuk pembangunan bank sampah di tingkat desa. Permasalahan ini diselesaikan melalui koordinasi intensif dengan Ketua RT 17 dan kader Posyandu setempat, yang akhirnya menghibahkan lahan di samping rumah salah satu warga sebagai lokasi pembangunan. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi melalui forum Posyandu, pembangunan fisik bank sampah selama tiga hari dengan swadaya masyarakat, penyusunan struktur kepengurusan beranggotakan sepuluh orang, hingga peresmian pada tanggal 20 Agustus 2026. Sistem kerja bank sampah dirancang dengan mekanisme pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu lainnya oleh petugas, di mana sampah organik dimanfaatkan kembali menjadi pupuk cair. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat mampu

mengatasi keterbatasan sumber daya desa dan membangun kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tazaka, M. N., Huda, M. N., Ali, A. S. ., Aini, I. N. ., Nurmala, C. H. ., Ramadhani, T. W., & Febrianty, I. . (2026). Revitalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah sebagai Upaya Mewujudkan Lingkungan Bebas Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3054-3073. <https://doi.org/10.63822/2x58pm76>

PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar bagi banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Jatiprahu, Kecamatan Karanggen, Kabupaten Trenggalek. Sebagai desa yang berada di wilayah pedesaan dengan aktivitas warga yang padat, kebutuhan akan fasilitas pengelolaan sampah yang layak menjadi hal mendesak. Sayangnya, hingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berlangsung, Desa Jatiprahu belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang representatif. Ketiadaan fasilitas ini berimbas pada munculnya kebiasaan buruk di kalangan warga, yakni membuang sampah ke aliran sungai atau membakarnya secara langsung di pekarangan rumah masing-masing.

Permasalahan ini pertama kali terungkap bukan melalui observasi lapangan semata, melainkan dari interaksi digital antara mahasiswa KKN dan masyarakat. Salah satu konten yang diunggah oleh kelompok KKN di platform TikTok mendapat komentar dari seorang warga yang mengeluhkan kebingungannya mencari tempat pembuangan sampah di Desa Jatiprahu. Temuan sederhana ini menjadi titik awal bagi tim untuk menelusuri lebih jauh kondisi pengelolaan sampah di desa tersebut, dan hasilnya menguatkan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan sekadar keluhan individu.

Kebiasaan membakar sampah, meskipun dianggap sebagai solusi praktis oleh sebagian warga, sesungguhnya bukan jawaban yang tepat. Pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan menuju pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian pencemaran udara, sehingga praktik pembakaran sampah terbuka jelas bertentangan dengan semangat kebijakan tersebut. Di sisi lain, pembuangan sampah ke sungai berpotensi mencemari sumber air, merusak ekosistem perairan, dan menimbulkan risiko banjir akibat penyumbatan aliran air oleh tumpukan sampah. Kedua praktik ini, jika dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat Desa Jatiprahu di masa mendatang.

Menyikapi kondisi tersebut, kelompok KKN memandang perlu adanya solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah pembentukan Bank Sampah, yakni sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di mana warga menyetorkan sampah yang telah dipilah untuk kemudian dicatat sebagai tabungan yang memiliki nilai ekonomi. Model ini dipilih karena telah terbukti berhasil diterapkan di berbagai daerah, salah satunya di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, yang menjadi rujukan studi tiru bagi tim KKN.

Program Bank Sampah tidak hanya berorientasi pada aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui hasil penjualan sampah anorganik dan pemanfaatan sampah organik menjadi produk bernilai guna, seperti pupuk cair. Dengan demikian, program ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis aset (Asset Based Community Development/ABCD), yang menempatkan potensi dan partisipasi warga sebagai kekuatan utama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama, bukan semata-mata mengandalkan bantuan dari pihak luar.

Fenomena minimnya fasilitas pengelolaan sampah sesungguhnya bukan persoalan yang unik dialami oleh Desa Jatiprahu semata, melainkan gambaran umum yang dihadapi oleh banyak desa di wilayah pedesaan Indonesia. Keterbatasan anggaran desa, luasnya cakupan wilayah pelayanan, serta minimnya prioritas pembangunan pada sektor persampahan sering kali menjadi faktor penyebab utama. Dalam

konteks ini, kehadiran mahasiswa KKN sebagai agen perubahan (agent of change) memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya pemerintah desa, melalui penyediaan solusi inovatif yang bersifat aplikatif dan berbasis potensi lokal.

Bank Sampah sebagai salah satu model pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan konvensional, karena tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penampungan, tetapi juga sebagai wadah edukasi lingkungan dan instrumen pemberdayaan ekonomi warga. Melalui skema tabungan sampah, masyarakat memperoleh insentif langsung atas partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga perubahan perilaku yang diharapkan bersifat lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan imbauan atau larangan tanpa disertai manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain aspek ekonomi, pembentukan Bank Sampah juga relevan dengan upaya mendukung capaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan, tujuan ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim. Dengan mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka, program ini turut berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon di tingkat desa, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses pembentukan Bank Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu, mulai dari identifikasi masalah, studi tiru, penyelesaian kendala lahan, sosialisasi, pembangunan fisik, hingga peresmian dan pembentukan struktur kepengurusan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran utuh mengenai proses pengabdian yang telah dilakukan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi program pengabdian masyarakat serupa di desa lain yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah. Secara lebih rinci, artikel ini diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana proses identifikasi dan perumusan masalah pengelolaan sampah di RT 17 Desa Jatiprahu; (2) bagaimana strategi tim KKN dalam mengatasi kendala lahan dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan; dan (3) bagaimana mekanisme kerja serta potensi keberlanjutan Bank Sampah yang telah dibentuk.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan **partisipatif** dengan menerapkan prinsip **Asset Based Community Development (ABCD)**. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di RT 17 Desa Jatiprahu. Aset yang dimanfaatkan meliputi modal sosial masyarakat berupa semangat gotong royong, peran kader Posyandu dan Ketua RT sebagai penggerak masyarakat, serta ketersediaan lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan Bank Sampah.

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu **identifikasi masalah, studi tiru, koordinasi dan pemetaan potensi, sosialisasi, pembangunan sarana Bank Sampah, pembentukan kepengurusan, serta peresmian dan serah terima program**. Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah. Selanjutnya,

tim melakukan studi tiru ke Bank Sampah Desa Sukorejo sebagai referensi dalam merancang sistem pengelolaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat RT 17 Desa Jatiprahu.

Tahap koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa, Ketua RT 17, kader Posyandu, dan masyarakat untuk memperoleh dukungan serta menentukan lokasi pembangunan Bank Sampah. Sosialisasi kemudian dilaksanakan melalui forum Posyandu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Pembangunan Bank Sampah dilakukan secara swadaya melalui gotong royong masyarakat selama tiga hari, yang dilanjutkan dengan pembentukan struktur kepengurusan beranggotakan sepuluh orang. Program diakhiri dengan peresmian dan serah terima pengelolaan Bank Sampah kepada masyarakat sebagai upaya menjaga keberlanjutan program.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini meliputi **observasi partisipatif, wawancara informal, dokumentasi, dan studi pustaka**. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara **deskriptif kualitatif** untuk menggambarkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pembentukan Bank Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal Pengelolaan Sampah di Desa Jatiprahu

Sebelum dilaksanakannya program pembentukan Bank Sampah, kondisi pengelolaan sampah rumah tangga di RT 17 Desa Jatiprahu masih menghadapi berbagai permasalahan. Ketiadaan fasilitas pengelolaan dan tempat pembuangan sampah yang memadai menyebabkan sebagian masyarakat memilih cara praktis dalam menangani sampah rumah tangga, yaitu dengan membakar sampah secara terbuka atau membuangnya ke sungai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat belum berjalan secara optimal dan belum didukung oleh sarana pengelolaan yang dapat digunakan secara mudah dan berkelanjutan.

Praktik pembakaran sampah rumah tangga dan pembuangan sampah ke sungai tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Pembakaran sampah secara terbuka dapat menimbulkan asap dan bau yang mengganggu lingkungan sekitar, sedangkan pembuangan sampah ke sungai berpotensi menyebabkan pencemaran serta mengurangi kualitas kebersihan aliran sungai. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya alternatif pengelolaan yang tepat, permasalahan sampah berpotensi menjadi persoalan lingkungan yang semakin sulit dikendalikan.

Permasalahan tersebut kemudian memperoleh perhatian dari masyarakat setempat. Aspirasi mengenai kebutuhan akan tempat pembuangan dan pengelolaan sampah disampaikan kepada mahasiswa KKN, salah satunya melalui interaksi masyarakat pada media sosial kelompok KKN. Keluhan tersebut menjadi salah satu dasar bagi mahasiswa KKN untuk mengidentifikasi lebih lanjut kondisi pengelolaan sampah di lingkungan RT 17. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan persampahan bukan sekadar persoalan perilaku masyarakat, melainkan juga berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang terorganisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa KKN berinisiatif merancang pembentukan Bank Sampah sebagai salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Bank Sampah dipandang tidak hanya sebagai tempat untuk menampung sampah, tetapi juga

sebagai sarana untuk mengubah pola pengelolaan sampah dari praktik pembuangan atau pembakaran menjadi kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih terarah bagi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai dan membakar sampah secara terbuka.

Dengan demikian, kondisi awal pengelolaan sampah di RT 17 Desa Jatiprahu menjadi dasar penting dalam perumusan program Bank Sampah. Program tersebut tidak semata-mata hadir sebagai pembangunan sarana fisik, tetapi merupakan respons terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang kemudian dikembangkan melalui pendekatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat sejak tahap identifikasi permasalahan menjadi penting agar Bank Sampah yang dibentuk tidak hanya dapat digunakan selama pelaksanaan KKN, tetapi juga memiliki peluang untuk dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat setelah program KKN berakhir.

B. Proses Pembelajaran dari Bank Sampah Desa Sukorejo

Sebagai bagian dari upaya merancang sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi masyarakat RT 17 Desa Jatiprahu, mahasiswa KKN melakukan studi tiru ke Bank Sampah Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting karena memberikan kesempatan kepada tim untuk memperoleh pengalaman dan gambaran secara langsung mengenai pengelolaan Bank Sampah yang telah berjalan di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mempelajari praktik pengelolaan sampah yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi di Desa Jatiprahu.

Dalam kegiatan studi tiru tersebut, mahasiswa KKN mempelajari berbagai tahapan pengelolaan sampah, mulai dari proses pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai guna, hingga proses pengolahan dan daur ulang sampah. Pemahaman mengenai pemilahan menjadi hal penting karena menjadi tahap awal dalam menentukan pengelolaan sampah selanjutnya. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat dikumpulkan dan diproses untuk kemudian disalurkan, sedangkan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna.

Selain mempelajari proses pengolahan sampah, tim juga memperoleh pemahaman mengenai alur distribusi sampah setelah dikumpulkan dan dipilah. Pengelolaan yang dilakukan secara sistematis menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan sampah, tetapi membutuhkan mekanisme lanjutan agar sampah dapat disalurkan atau diolah sesuai dengan jenisnya. Pengetahuan tersebut menjadi pertimbangan bagi mahasiswa KKN dalam merancang mekanisme kerja Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu agar proses pengelolaannya dapat berlangsung secara terarah.

Hal lain yang menjadi pembelajaran penting adalah strategi membangun partisipasi masyarakat. Keberhasilan Bank Sampah tidak hanya ditentukan oleh tersedianya tempat atau sarana pengelolaan sampah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung menghasilkan dan mengelola sampah rumah tangga. Oleh karena itu, tim KKN mempelajari bagaimana proses sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus mendorong munculnya kesadaran dan kemauan warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah. Hal ini sejalan dengan

pengalaman Bank Sampah Desa Sukorejo yang menunjukkan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pengelola serta adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh warga.

Hasil dari kegiatan studi tiru tersebut kemudian tidak diterapkan secara keseluruhan, melainkan dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat RT 17 Desa Jatiprahu. Beberapa sistem yang dinilai relevan, khususnya dalam hal pemilahan, pengumpulan, pengolahan, penyaluran sampah, serta upaya membangun partisipasi masyarakat, kemudian diadaptasi sebagai bagian dari rancangan Bank Sampah RT 17. Proses adaptasi ini menunjukkan bahwa studi tiru berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan yang memungkinkan pengalaman dari desa lain dikembangkan menjadi program yang lebih kontekstual sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan demikian, kegiatan studi tiru ke Bank Sampah Desa Sukorejo memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan pembentukan Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu. Pengalaman yang diperoleh menjadi dasar bagi mahasiswa KKN untuk menyusun sistem pengelolaan yang lebih terarah sekaligus memahami bahwa keberhasilan Bank Sampah membutuhkan perpaduan antara sistem pengelolaan yang jelas, pemanfaatan sampah secara optimal, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan program Bank Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu.

C. Penyelesaian Kendala Lahan melalui Pendekatan Kolaboratif

Salah satu kendala yang dihadapi mahasiswa KKN dalam proses pembentukan Bank Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu adalah keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Ketersediaan lahan merupakan kebutuhan penting karena Bank Sampah tidak hanya membutuhkan tempat untuk bangunan, tetapi juga memerlukan ruang untuk menerima, memilah, menimbang, menyimpan, dan mengelola sampah yang dikumpulkan dari masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lahan yang memadai menjadi salah satu faktor utama yang perlu dipastikan sebelum pembangunan Bank Sampah dilaksanakan. Kondisi tersebut pada awalnya menjadi salah satu hambatan dalam merealisasikan program yang telah direncanakan oleh mahasiswa KKN.

Sebagai langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa KKN melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa Jatiprahu beserta perangkat desa. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemungkinan tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Bank Sampah. Upaya ini sekaligus dimaksudkan untuk memastikan agar pembangunan fasilitas pengelolaan sampah memperoleh dukungan dari pemerintah desa dan dapat ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, belum terdapat lahan desa yang dapat digunakan secara langsung untuk pembangunan Bank Sampah.

Keterbatasan lahan di tingkat desa kemudian mendorong mahasiswa KKN untuk tidak berhenti pada alternatif yang berasal dari pemerintah desa. Mengingat lokasi posko KKN berada di sekitar lingkungan RT 17, mahasiswa kemudian memperluas koordinasi dengan masyarakat setempat. Konsultasi dilakukan bersama Ketua RT, warga, serta tokoh masyarakat untuk mencari kemungkinan pemanfaatan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan komunikasi secara kekeluargaan agar solusi yang diperoleh benar-benar berasal dari kesepakatan dan

kesediaan masyarakat, bukan semata-mata keputusan dari mahasiswa KKN. Pendekatan kolaboratif semacam ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan berbasis aset yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian masalah.

Dari proses konsultasi tersebut, diperoleh informasi mengenai adanya lahan milik Bapak Sutikno yang berada di lingkungan RT 17 dan dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan Bank Sampah. Setelah dilakukan komunikasi lebih lanjut, Bapak Sutikno menyatakan kesediaannya untuk memanfaatkan lahannya sebagai lokasi pembangunan Bank Sampah. Ketersediaan tersebut menjadi titik penting dalam penyelesaian kendala yang sebelumnya dihadapi oleh mahasiswa KKN. Dengan adanya ketersediaan pemilik lahan, proses perencanaan pembangunan Bank Sampah dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan teknis bangunan.

Dalam menentukan lokasi Bank Sampah, lahan yang digunakan idealnya memiliki beberapa pertimbangan dasar, antara lain mudah dijangkau oleh masyarakat, berada pada lokasi yang aman dan tidak mengganggu aktivitas warga sekitar, memiliki kondisi lahan yang memungkinkan untuk pembangunan, serta memiliki ruang yang cukup untuk mendukung aktivitas pengelolaan sampah. Selain itu, lokasi juga perlu memungkinkan dilakukannya kegiatan pemilahan, penimbangan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan sampah secara efektif. Pertimbangan tersebut penting agar keberadaan Bank Sampah tidak hanya dapat dibangun secara fisik, tetapi juga dapat menunjang kegiatan operasional secara berkelanjutan. Lahan yang diperoleh melalui ketersediaan Bapak Sutikno kemudian menjadi salah satu bentuk pemanfaatan aset yang tersedia di lingkungan masyarakat. Penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas di tingkat desa dapat diatasi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga menjadi pihak yang turut menyediakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bersama. Hal tersebut memperkuat temuan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, kedekatan, dan hubungan kekeluargaan antarwarga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pengabdian masyarakat.

Proses penyediaan lahan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembentukan Bank Sampah tidak dapat dilepaskan dari hubungan kolaboratif antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, Ketua RT, dan masyarakat. Mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan setempat. Sementara itu, pemerintah desa dan masyarakat memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pola kerja sama tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap berikutnya, yaitu pembangunan sarana Bank Sampah secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat RT 17.

Dengan demikian, penyelesaian kendala lahan dalam pembentukan Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu menjadi penghalang bagi pelaksanaan program apabila terdapat komunikasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Lahan yang pada awalnya menjadi kendala dapat ditemukan melalui pemetaan aset dan konsultasi dengan masyarakat sekitar. Ketersediaan Bapak Sutikno untuk menyediakan lahannya menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah. Temuan ini sekaligus memperkuat pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang digunakan dalam program, yaitu mengoptimalkan aset dan potensi yang telah tersedia di masyarakat sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan bersama.

D. Respons dan Partisipasi Masyarakat

Respons masyarakat RT 17 Desa Jatiprahu terhadap rencana pembentukan Bank Sampah menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Antusiasme tersebut muncul karena permasalahan sampah telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, khususnya ke aliran sungai, dinilai telah mengganggu kenyamanan lingkungan dan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki kebutuhan yang nyata terhadap adanya fasilitas pengelolaan sampah yang lebih terarah dan mudah dijangkau.

Keberadaan Bank Sampah kemudian dipandang oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Program yang ditawarkan mahasiswa KKN tidak hanya dipahami sebagai pembangunan sebuah tempat untuk menampung sampah, tetapi juga sebagai upaya untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang lebih tertib di lingkungan RT 17. Hal ini terlihat dari respons positif masyarakat ketika mahasiswa KKN menyampaikan rencana pembentukan Bank Sampah dan menjelaskan manfaatnya bagi kebersihan lingkungan.

Antusiasme masyarakat semakin terlihat pada saat proses persiapan pembangunan Bank Sampah. Masyarakat tidak hanya memberikan dukungan secara lisan, tetapi turut berpartisipasi secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan. Warga secara sukarela membantu mahasiswa KKN dalam mempersiapkan dan membangun sarana fisik Bank Sampah. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa penyelesaian persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif dari masyarakat.

Proses pembangunan Bank Sampah dilaksanakan dengan semangat gotong royong. Mahasiswa KKN bersama masyarakat saling membantu dalam berbagai kebutuhan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi antara mahasiswa dan warga sekaligus memperkuat hubungan sosial yang telah terbangun selama pelaksanaan KKN. Semangat gotong royong yang muncul juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal penting karena Bank Sampah pada dasarnya merupakan program yang keberlangsungannya sangat bergantung pada keterlibatan warga. Masyarakat merupakan pihak yang menghasilkan sampah rumah tangga sekaligus menjadi pengguna utama fasilitas Bank Sampah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal pembangunan dapat menjadi dasar untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang telah dibangun. Dengan adanya rasa memiliki tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya berpartisipasi pada saat pembangunan, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan Bank Sampah setelah program KKN selesai.

Respons positif tersebut juga menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan dapat menjadi titik awal munculnya gerakan bersama di tingkat masyarakat. Ketidaknyamanan yang sebelumnya dirasakan akibat pembuangan sampah ke sungai mendorong masyarakat untuk menerima dan mendukung adanya alternatif pengelolaan sampah. Dalam hal ini, mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program yang dapat diterapkan di lingkungan setempat, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pelaksanaannya.

Partisipasi warga dalam pembangunan Bank Sampah juga memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat lebih memungkinkan terciptanya keberlanjutan program. Apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, keberlangsungan program berpotensi bergantung pada keberadaan mahasiswa KKN. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pembangunan dapat membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap keberadaan Bank Sampah. Hal ini sejalan dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang menempatkan potensi, kemampuan, dan modal sosial masyarakat sebagai kekuatan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama.

Dengan demikian, respons dan partisipasi masyarakat RT 17 Desa Jatiprahu menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan pembentukan Bank Sampah. Antusiasme warga yang berangkat dari kebutuhan nyata terhadap lingkungan yang lebih bersih kemudian diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan sarana Bank Sampah secara gotong royong. Partisipasi tersebut menjadi modal awal yang penting bagi keberlanjutan program, karena keberadaan Bank Sampah tidak hanya bergantung pada sarana fisik yang telah dibangun, tetapi juga pada kemauan dan konsistensi masyarakat untuk menggunakannya serta menjaga keberlangsungannya.

E. Struktur Kepengurusan Bank Sampah

Sebagai wujud kesiapan program untuk berjalan secara mandiri, tim KKN bersama masyarakat membentuk struktur kepengurusan Bank Sampah yang terdiri atas sepuluh orang pengurus. Susunan kepengurusan tersebut mencakup ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta sejumlah seksi teknis yang menangani pemilahan sampah, penimbangan dan pencatatan tabungan, kerja sama dengan pengepul, pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair, hingga humas dan sosialisasi. Struktur ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Struktur Kepengurusan Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu

No	Jabatan	Keterangan
1	Ketua	Ibu Istisaroh
2	Wakil Ketua	Bapak Sutik
3	Sekretaris	Ibu Siti
4	Bendahara	Ibi Jamilah
5	Seksi Pemilahan Sampah Organik	Warga RT 17
6	Seksi Pemilahan Sampah Anorganik	Warga RT 17
7	Seksi Penimbangan & Pencatatan Tabungan	Warga RT 17
8	Seksi Pemasaran/Kerja Sama Pengepul	Warga RT 17
9	Seksi Pengolahan Pupuk Cair	Warga RT 17
10	Seksi Humas & Sosialisasi	Warga RT 17

Pembentukan kepengurusan dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa kegiatan Bank Sampah dapat berjalan secara terorganisasi dan tidak bergantung pada mahasiswa KKN. Struktur kepengurusan yang dibentuk terdiri atas sepuluh orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda sesuai dengan

bidang masing-masing. Pembagian tugas tersebut meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi teknis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah.

Ketua memiliki tugas sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah. Ketua berperan dalam mengoordinasikan seluruh pengurus, memastikan setiap bagian menjalankan tugasnya, serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketua juga menjadi pihak yang mengoordinasikan hubungan antara pengurus Bank Sampah dengan masyarakat maupun pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, ketua didampingi oleh wakil ketua yang berfungsi membantu koordinasi kegiatan dan menggantikan peran ketua apabila diperlukan.

Sekretaris bertugas menangani aspek administrasi dalam pelaksanaan Bank Sampah. Tugas tersebut meliputi pencatatan berbagai kegiatan, penyusunan administrasi kepengurusan, serta membantu memastikan informasi mengenai kegiatan Bank Sampah terdokumentasi dengan baik. Keberadaan sekretaris diperlukan agar kegiatan Bank Sampah memiliki administrasi yang tertib sehingga setiap kegiatan dan perkembangan program dapat diketahui serta menjadi bahan evaluasi bagi pengurus.

Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Bank Sampah. Peran bendahara berkaitan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang muncul dalam kegiatan operasional Bank Sampah serta menjaga agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara tertib dan transparan. Dalam sistem Bank Sampah, aspek keuangan menjadi penting karena sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi akan ditimbang dan dicatat sebagai bagian dari tabungan nasabah sebelum kemudian disalurkan kepada pengepul.

Seksi pemilahan sampah organik memiliki tugas melakukan pemilahan dan penanganan terhadap sampah yang berasal dari rumah tangga dan termasuk dalam kategori organik. Sampah organik yang telah dipisahkan selanjutnya dapat diarahkan untuk proses pengolahan menjadi pupuk cair. Sementara itu, seksi pemilahan sampah anorganik bertugas memisahkan sampah yang memiliki nilai jual, seperti plastik, kertas, dan logam. Sampah anorganik tersebut kemudian dipersiapkan untuk proses penimbangan dan pencatatan sebelum disalurkan kepada pihak pengepul.

Seksi penimbangan dan pencatatan tabungan memiliki tugas untuk melakukan penimbangan terhadap sampah anorganik yang disetorkan oleh masyarakat sekaligus mencatat hasil penimbangan tersebut sebagai saldo tabungan nasabah. Pencatatan yang dilakukan secara tertib diperlukan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Bank Sampah. Dengan adanya pencatatan tersebut, masyarakat dapat mengetahui hasil dari sampah yang mereka setorkan dan nilai ekonomi yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Seksi pemasaran dan kerja sama dengan pengepul bertugas menangani proses penyaluran sampah anorganik yang telah dikumpulkan dan memiliki nilai ekonomi. Seksi ini berperan dalam membangun dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak pengepul sehingga sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan dapat disalurkan secara tepat. Keberadaan seksi ini penting karena keberlanjutan Bank Sampah juga berkaitan dengan adanya jalur distribusi yang jelas bagi sampah yang memiliki nilai jual.

Seksi pengolahan pupuk cair bertugas menangani pemanfaatan sampah organik melalui proses pengolahan menjadi pupuk cair. Pengolahan dilakukan dengan teknik fermentasi sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya masyarakat RT 17. Pupuk cair yang dihasilkan dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan tanaman pekarangan maupun lahan pertanian skala kecil. Dengan demikian, sampah organik tidak hanya berakhir sebagai limbah, tetapi dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna.

Sementara itu, seksi humas dan sosialisasi memiliki tugas membangun komunikasi antara pengurus Bank Sampah dengan masyarakat. Seksi ini berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan, jadwal, mekanisme penyetoran sampah, pemilahan sampah, serta manfaat keberadaan Bank Sampah kepada warga. Sosialisasi menjadi bagian penting karena keberhasilan Bank Sampah sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk memilah dan menyetorkan sampah rumah tangganya secara rutin. Dengan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan partisipasi masyarakat dapat terus terjaga dan semakin berkembang.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur kepengurusan memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam satu rangkaian pengelolaan sampah. Ketua dan wakil ketua menjalankan fungsi koordinasi, sekretaris dan bendahara mendukung aspek administrasi serta keuangan, sedangkan seksi-seksi teknis menjalankan proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, penimbangan, pencatatan, penyaluran, pengolahan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Struktur yang demikian diharapkan dapat membuat operasional Bank Sampah berjalan secara sistematis sekaligus memberikan kejelasan tanggung jawab kepada masing-masing pengurus.

Dengan terbentuknya struktur kepengurusan tersebut, Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu memiliki dasar kelembagaan untuk melanjutkan kegiatan setelah berakhirnya masa KKN. Pembagian tugas yang jelas menjadi salah satu bentuk persiapan agar program tidak berhenti setelah mahasiswa KKN meninggalkan lokasi pengabdian. Keberlanjutan tersebut tetap memerlukan komitmen dari para pengurus dan masyarakat, tetapi keberadaan struktur kepengurusan menjadi langkah awal untuk membangun pengelolaan Bank Sampah yang lebih mandiri, terarah, dan berkelanjutan.

F. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu dirancang sebagai sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sistem ini menempatkan warga bukan hanya sebagai penghasil sampah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses pemilahan, penyetoran, pencatatan, dan pemanfaatan sampah. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat bahwa sampah merupakan limbah yang tidak bernilai menjadi sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan.

Mekanisme kerja Bank Sampah diawali dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Warga diarahkan untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum disetorkan kepada pengurus. Pemilahan awal tersebut penting karena dapat memudahkan proses pengelolaan berikutnya, mengurangi pencampuran sampah, serta meningkatkan nilai jual sampah anorganik. Selain itu, pemilahan dari sumber dapat menumbuhkan kebiasaan baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Sampah yang disetorkan warga kemudian diterima oleh petugas Bank Sampah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan jenis sampah untuk memastikan bahwa sampah yang diterima sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Sampah tersebut

selanjutnya dikelompokkan menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu atau jenis sampah lain yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung.

Sampah anorganik yang memiliki nilai jual, seperti botol plastik, kardus, kertas, dan logam, selanjutnya ditimbang oleh petugas. Hasil penimbangan dicatat dalam buku administrasi atau buku tabungan nasabah. Pencatatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi pengelolaan Bank Sampah karena warga dapat mengetahui jumlah sampah yang disetorkan dan nilai ekonominya. Ketepatan pencatatan juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus.

Sampah anorganik yang telah terkumpul disimpan sementara di tempat yang telah disediakan sebelum dijual kepada pengepul. Penjualan dilakukan setelah jumlah sampah dianggap mencukupi atau pada waktu yang telah disepakati dengan mitra pengepul. Hasil penjualan tersebut dapat menjadi sumber pemasukan Bank Sampah dan selanjutnya dikonversikan menjadi saldo tabungan nasabah sesuai dengan kesepakatan pengelolaan. Pola ini membentuk hubungan antara perilaku memilah sampah dan manfaat ekonomi yang diterima warga.

Berbeda dengan sampah anorganik, sampah organik diarahkan untuk diolah menjadi pupuk cair. Pengolahan dilakukan melalui proses fermentasi sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya masyarakat setempat. Pupuk cair tersebut dapat digunakan oleh warga untuk tanaman pekarangan maupun lahan pertanian skala kecil. Apabila kualitas dan produksinya telah stabil, pupuk cair juga berpotensi dikembangkan sebagai produk bernilai ekonomi.

Sampah residu yang tidak memiliki nilai guna atau nilai jual dipisahkan dari sampah organik dan anorganik. Pemisahan ini bertujuan agar sampah residu tidak mencemari sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Pada tahap awal, pengelolaan sampah residu masih memerlukan koordinasi dengan sistem pembuangan atau pengangkutan yang tersedia. Oleh karena itu, pengurus perlu menyusun prosedur khusus agar residu tidak kembali dibuang ke sungai atau dibakar secara terbuka.

Secara keseluruhan, mekanisme kerja Bank Sampah RT 17 membentuk siklus pengelolaan yang meliputi pemilahan, penyortiran, penimbangan, pencatatan, pengolahan, dan penjualan. Mekanisme tersebut juga menciptakan siklus ekonomi sederhana karena sampah anorganik dapat menghasilkan tabungan, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair. Pelaksanaan mekanisme ini membutuhkan kedisiplinan pengurus, partisipasi nasabah, pencatatan yang transparan, serta evaluasi rutin agar Bank Sampah dapat berfungsi secara konsisten setelah pendampingan mahasiswa KKN berakhir.

G. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan program Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu didukung oleh adanya permasalahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebelum program dilaksanakan, warga menghadapi keterbatasan fasilitas pembuangan sampah sehingga sebagian di antara mereka membuang sampah ke sungai atau melakukan pembakaran terbuka. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan yang jelas terhadap sistem pengelolaan sampah yang lebih teratur dan mudah diakses oleh masyarakat.

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya pengalaman dari Bank Sampah Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, yang dijadikan sebagai lokasi studi tiru. Studi tersebut memberikan gambaran praktis mengenai tata kelola, pemilahan, pencatatan, dan kemungkinan manfaat ekonomi dari sampah. Keberadaan contoh nyata menjadi sumber motivasi bagi tim pelaksana dan masyarakat karena program

yang dirancang tidak sepenuhnya bersifat abstrak. Masyarakat dapat melihat bahwa Bank Sampah berpotensi dijalankan secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik.

Dukungan Ketua RT 17 dan kader Posyandu juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Kedua unsur tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih efektif. Kader Posyandu, khususnya, memiliki akses terhadap kelompok ibu rumah tangga yang berperan penting dalam pengelolaan sampah domestik. Dukungan tokoh lokal membuat proses sosialisasi dan mobilisasi warga menjadi lebih mudah dilakukan.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya modal sosial berupa gotong royong, kepercayaan, dan kepedulian antarwarga. Modal sosial tersebut terlihat dari kesediaan warga untuk membantu pembangunan fisik Bank Sampah selama tiga hari. Partisipasi diberikan dalam bentuk tenaga maupun dukungan material sederhana. Keterlibatan langsung ini menunjukkan munculnya rasa memiliki terhadap program, sehingga Bank Sampah tidak hanya dipandang sebagai proyek mahasiswa, tetapi sebagai fasilitas bersama milik masyarakat.

Pembentukan struktur kepengurusan yang terdiri atas sepuluh orang juga menjadi unsur pendukung keberlangsungan program. Struktur tersebut mencakup ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi teknis. Pembagian tugas meliputi pemilahan sampah, penimbangan, pencatatan, pemasaran, pengolahan pupuk cair, serta humas dan sosialisasi. Pembagian tanggung jawab ini dapat mencegah penumpukan pekerjaan pada satu pihak dan meningkatkan keteraturan operasional.

Meskipun demikian, program menghadapi hambatan berupa keterbatasan lahan. Pada tahap awal, ketiadaan lahan di tingkat desa menjadi kendala dalam pembangunan fasilitas Bank Sampah. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana persampahan membutuhkan dukungan ruang yang memadai. Persoalan lahan akhirnya dapat diatasi melalui koordinasi dengan Ketua RT, kader Posyandu, dan warga yang bersedia menghibahkan lahan di samping rumahnya sebagai lokasi pembangunan.

Hambatan lain berkaitan dengan keterbatasan waktu pendampingan mahasiswa KKN. Pelaksanaan program yang berlangsung dalam waktu relatif singkat menyebabkan proses pembinaan, penguatan kapasitas pengurus, dan pengukuran hasil belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, pengurus Bank Sampah merupakan warga yang memiliki kesibukan dan pekerjaan masing-masing. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi jadwal pelayanan, pencatatan, pengolahan, dan pemasaran sampah.

Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat program memiliki hubungan yang erat dengan kapasitas lokal. Dukungan sosial, kepemimpinan lokal, gotong royong, dan keberadaan contoh keberhasilan dapat memperkuat program. Sebaliknya, keterbatasan lahan, waktu, fasilitas, dan sumber daya manusia dapat menghambat kesinambungan kegiatan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, pembinaan berkala, prosedur kerja yang sederhana, serta dukungan pemerintah desa agar faktor pendukung dapat dipertahankan dan hambatan dapat dikurangi.

H. Dampak dan Keberlanjutan Program

Pembentukan Bank Sampah memberikan dampak awal terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan pengelolaan sampah. Sebelum program dilaksanakan, pembuangan sampah ke sungai dan pembakaran terbuka menjadi pilihan yang dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas pengelolaan yang memadai. Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat memperoleh alternatif yang lebih

terarah untuk menangani sampah rumah tangga. Dampak ini penting karena perubahan perilaku sering kali memerlukan dukungan fasilitas yang konkret.

Dampak lingkungan yang diharapkan dari program ini adalah berkurangnya sampah yang dibuang ke sungai. Apabila warga secara konsisten menyetorkan sampah ke Bank Sampah, jumlah sampah yang masuk ke aliran sungai dapat ditekan. Pengurangan tersebut berpotensi membantu menjaga kebersihan sumber air, mengurangi risiko penyumbatan aliran, dan mencegah kerusakan ekosistem perairan. Namun, dampak lingkungan tersebut perlu dibuktikan melalui pemantauan rutin terhadap volume sampah yang dikumpulkan dan perubahan kondisi lingkungan sekitar.

Program ini juga berpotensi mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka. Sampah anorganik yang sebelumnya mungkin dibakar dapat dipilah dan dijual kepada pengepul, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair. Dengan demikian, Bank Sampah menyediakan pilihan pengelolaan yang lebih produktif daripada pembakaran. Pengurangan pembakaran juga dapat mendukung upaya menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak pencemaran di lingkungan permukiman.

Dari aspek ekonomi, sampah anorganik yang disetorkan warga memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah. Hasil penimbangan dicatat sebagai tabungan yang dapat dikonversikan sesuai ketentuan yang disepakati oleh pengurus dan nasabah. Meskipun nilai ekonomi yang diterima setiap warga kemungkinan tidak besar, skema ini memberikan insentif langsung atas perilaku memilah sampah. Insentif tersebut dapat menjadi faktor pendorong agar partisipasi masyarakat tidak hanya berlangsung pada tahap awal program.

Sampah organik yang diolah menjadi pupuk cair juga membuka peluang ekonomi dan manfaat produktif bagi warga. Pupuk cair dapat digunakan untuk tanaman pekarangan atau lahan pertanian masyarakat sehingga mengurangi kebutuhan pembelian pupuk tertentu. Apabila dikelola secara konsisten, produk tersebut dapat dikemas, diberi label, dan dipasarkan dalam lingkup desa. Pengembangan produk organik akan memperluas fungsi Bank Sampah dari sekadar tempat pengumpulan sampah menjadi pusat pengolahan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Dampak sosial program terlihat dari terbentuknya kepengurusan dan meningkatnya ruang interaksi antarwarga. Bank Sampah dapat menjadi forum kerja sama yang mempertemukan pengurus, nasabah, kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Interaksi tersebut berpotensi memperkuat gotong royong dan rasa tanggung jawab kolektif. Selain itu, keterlibatan warga dalam pembangunan fasilitas turut membentuk rasa memiliki terhadap program.

Keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mengambil alih pengelolaan setelah masa KKN berakhir. Pengurus perlu memiliki jadwal operasional yang jelas, sistem pencatatan yang terbuka, pembagian tugas yang realistis, dan mekanisme pelaporan secara berkala. Dukungan pemerintah desa juga diperlukan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi sarana, penguatan legalitas, dan jejaring kerja sama dengan pengepul atau Dinas Lingkungan Hidup. Tanpa dukungan kelembagaan, program berisiko mengalami penurunan aktivitas setelah antusiasme awal berkurang.

Oleh karena itu, keberlanjutan Bank Sampah perlu dirancang melalui beberapa langkah strategis. Pengurus dapat menetapkan jadwal penyetoran rutin, melakukan evaluasi bulanan, mendata jumlah nasabah, serta mencatat volume dan nilai sampah yang terkumpul. Edukasi juga perlu dilakukan secara berulang melalui forum Posyandu, pertemuan RT, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dalam jangka

panjang, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya peresmian, tetapi dari kemampuan Bank Sampah mempertahankan operasional, meningkatkan partisipasi, menghasilkan manfaat ekonomi, dan mengurangi perilaku pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan.

I. Refleksi Program dalam Perspektif Pemberdayaan Berbasis Aset

Program Bank Sampah RT 17 dapat dipahami sebagai praktik pemberdayaan masyarakat berbasis aset atau Asset Based Community Development (ABCD). Pendekatan ini tidak memulai proses pemberdayaan semata-mata dari kekurangan masyarakat, melainkan dari aset, kemampuan, relasi, dan potensi yang telah dimiliki. Dalam konteks program ini, permasalahan ketiadaan fasilitas sampah menjadi pintu masuk untuk menemukan kekuatan lokal yang dapat digunakan dalam penyelesaiannya.

Aset pertama yang tampak adalah modal sosial masyarakat. Hubungan kedekatan antarwarga, komunikasi melalui Ketua RT, serta peran kader Posyandu menjadi kekuatan yang memungkinkan program diterima dan dijalankan. Modal sosial tersebut terbukti penting ketika tim menghadapi kendala lahan. Penyelesaian masalah tidak hanya bergantung pada keputusan formal pemerintah desa, tetapi juga pada kepercayaan dan komunikasi yang dibangun di tingkat masyarakat.

Aset kedua adalah ketersediaan lahan yang dihibahkan oleh warga. Pada awalnya, ketiadaan lahan dipandang sebagai hambatan utama dalam pembangunan Bank Sampah. Namun, melalui pendekatan kolaboratif, ditemukan aset ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa aset lokal kadang tidak langsung terlihat apabila proses pemetaan hanya berfokus pada fasilitas milik pemerintah.

Aset ketiga adalah kapasitas organisasi masyarakat. Keberadaan kader Posyandu, Ketua RT, dan warga yang bersedia menjadi pengurus menunjukkan adanya sumber daya manusia yang dapat mengelola program. Pembentukan kepengurusan dengan pembagian tugas yang jelas menjadi proses penting dalam mengubah partisipasi spontan menjadi kapasitas kelembagaan. Dengan adanya struktur tersebut, Bank Sampah memiliki peluang untuk berjalan secara lebih teratur dan tidak sepenuhnya bergantung pada mahasiswa KKN.

Aset keempat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui studi tiru ke Bank Sampah Desa Sukorejo. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran antarkomunitas dan transfer pengalaman. Tim KKN berperan sebagai penghubung pengetahuan dengan membawa gagasan mengenai tabungan sampah, pemilahan, pencatatan, dan pemasaran kepada masyarakat RT 17. Pengetahuan tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemampuan warga.

Dari perspektif pemberdayaan, masyarakat tidak ditempatkan sebagai penerima bantuan pasif. Warga terlibat dalam proses identifikasi masalah, penyediaan lokasi, pembangunan fasilitas, pembentukan kepengurusan, dan pengelolaan program. Pola tersebut menunjukkan adanya proses penguatan kapasitas dan pengambilan keputusan bersama. Keberhasilan program dengan demikian tidak hanya terletak pada berdirinya bangunan Bank Sampah, tetapi juga pada tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk mengelola persoalan secara kolektif.

Meskipun demikian, refleksi ABCD juga menunjukkan bahwa pemberdayaan membutuhkan proses yang berkelanjutan. Aset yang telah ditemukan perlu dipelihara, dikembangkan, dan dihubungkan

dengan aset lain. Lahan perlu dirawat, pengurus perlu diperkuat, jaringan pengepul perlu diperluas, dan pengetahuan pengolahan sampah perlu terus ditingkatkan. Apabila tidak ada proses penguatan, aset yang ada dapat kehilangan fungsi karena keterbatasan waktu, kesibukan pengurus, atau menurunnya partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, program Bank Sampah RT 17 memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis aset mampu menghasilkan solusi yang kontekstual dan partisipatif. Ketiadaan fasilitas desa dapat diatasi melalui modal sosial, gotong royong, lahan warga, kepemimpinan lokal, dan pembelajaran dari desa lain. Refleksi ini menegaskan bahwa program pengabdian akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat menjadi pemilik sekaligus pengelola perubahan. Mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator, sedangkan kendali utama program tetap berada pada masyarakat dan kelembagaan lokal.

J. Keterbatasan Program

Keterbatasan pertama program terletak pada cakupan wilayah pelaksanaan. Bank Sampah baru dibentuk di RT 17 Desa Jatiprahu sehingga belum menjangkau seluruh RT atau dusun di wilayah desa. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program masih bersifat lokal. Warga di wilayah lain yang belum memiliki fasilitas serupa masih mungkin melakukan pembuangan sampah ke sungai atau pembakaran terbuka.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Program dilaksanakan dalam periode KKN yang relatif singkat dan berakhir pada tahap peresmian serta serah terima pengelolaan kepada masyarakat. Waktu tersebut belum cukup untuk mengukur konsistensi partisipasi warga, stabilitas pengurus, jumlah sampah yang terkumpul, dan perkembangan nilai ekonomi tabungan. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang program belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan proses pembentukan dan peresmian.

Keterbatasan ketiga adalah belum tersedianya data kuantitatif yang memadai. Program belum dilengkapi dengan data dasar mengenai jumlah rumah tangga, volume sampah sebelum dan sesudah program, jumlah nasabah aktif, frekuensi penyeteroran, pendapatan dari penjualan sampah, maupun jumlah pupuk cair yang dihasilkan. Ketiadaan data tersebut membatasi kemampuan peneliti untuk melakukan pengukuran dampak secara objektif. Evaluasi selanjutnya perlu menggunakan indikator yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Keterbatasan keempat berhubungan dengan sarana dan prasarana. Fasilitas Bank Sampah dibangun secara swadaya dengan menyesuaikan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kreativitas dan kemandirian, tetapi sekaligus dapat membatasi kapasitas penyimpanan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan operasional. Apabila volume sampah meningkat, fasilitas yang ada mungkin membutuhkan perluasan atau penambahan peralatan.

Keterbatasan kelima terdapat pada sistem administrasi dan pencatatan. Walaupun struktur kepengurusan telah dibentuk, mekanisme pencatatan tabungan, pelaporan keuangan, dan pengarsipan kegiatan masih perlu diperkuat. Administrasi yang belum seragam dapat menimbulkan kesulitan dalam menghitung saldo nasabah dan menyusun laporan keuangan. Transparansi menjadi aspek penting karena kepercayaan warga sangat menentukan keberlanjutan Bank Sampah.

Keterbatasan keenam adalah belum optimalnya jaringan pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar. Penjualan sampah anorganik masih bergantung pada pengepul, sementara pemasaran pupuk cair belum dikembangkan secara sistematis. Ketergantungan terhadap satu jalur pemasaran dapat memengaruhi pendapatan ketika harga sampah berubah atau pengepul tidak dapat mengambil sampah. Oleh sebab itu, pengurus perlu membangun kerja sama dengan beberapa pengepul, pemerintah desa, komunitas lingkungan, dan lembaga terkait.

Keterbatasan ketujuh berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya manusia. Para pengurus merupakan warga yang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga masing-masing. Kesibukan tersebut dapat memengaruhi konsistensi pelayanan, terutama apabila belum ada pembagian jadwal dan insentif yang jelas. Program juga belum memiliki sistem kaderisasi yang memastikan adanya generasi pengurus berikutnya apabila sebagian pengurus tidak lagi aktif.

Keterbatasan terakhir adalah belum dilakukannya evaluasi dampak kesehatan, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Program memiliki potensi mengurangi pencemaran dan meningkatkan kesadaran warga, tetapi potensi tersebut perlu dibuktikan melalui penelitian lanjutan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggabungkan observasi, wawancara, dokumentasi, pengukuran volume sampah, dan analisis perkembangan jumlah nasabah. Dengan mengakui keterbatasan tersebut, program dapat dikembangkan secara lebih realistis dan menjadi dasar perbaikan bagi replikasi Bank Sampah di wilayah lain.

KESIMPULAN

Program pembentukan Bank Sampah di RT 17 Desa Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, merupakan respons terhadap persoalan nyata ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah yang sebelumnya mendorong sebagian besar warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya secara terbuka. Melalui pendekatan studi tiru ke Bank Sampah Desa Sukorejo, koordinasi kolaboratif dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat tingkat RT, sosialisasi partisipatif, serta pembangunan berbasis gotong royong, program ini berhasil diwujudkan dan diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan struktur kepengurusan yang jelas. Mekanisme kerja Bank Sampah yang memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu, serta memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk cair, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi solusi yang berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari adanya modal sosial masyarakat, dukungan aktif Ketua RT 17 dan kader Posyandu, partisipasi warga dalam pembangunan fisik, serta pembelajaran dari contoh keberhasilan Bank Sampah di desa lain. Kendati demikian, program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan lahan di tingkat desa, keterbatasan waktu pendampingan KKN, dan ketergantungan keberlanjutan pada konsistensi pengurus serta partisipasi warga. Dalam perspektif pemberdayaan berbasis aset (ABCD), program ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan desa tidak selalu membutuhkan sumber daya baru dari luar, melainkan dapat dimulai dari optimalisasi aset yang sudah dimiliki masyarakat itu sendiri, seperti lahan warga, relasi sosial, dan kapasitas organisasi lokal.

Meskipun telah berhasil dilaksanakan hingga tahap peresmian, program ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya cakupan yang masih terbatas pada RT 17, belum adanya data kuantitatif dampak, sarana yang sederhana, administrasi yang perlu diperkuat, serta belum optimalnya jaringan pemasaran dan evaluasi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa, pembinaan terhadap pengurus, penguatan sistem administrasi, dan pengembangan jejaring kerja sama agar Bank Sampah RT 17 dapat terus beroperasi secara konsisten dan menjadi contoh bagi RT atau dusun lain di Desa Jatiprahu.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, disarankan agar pemerintah Desa Jatiprahu memberikan dukungan berkelanjutan terhadap operasional Bank Sampah RT 17, baik dalam bentuk pembinaan, fasilitasi kerja sama dengan pengepul dan dinas terkait, maupun replikasi program serupa di RT atau dusun lain. Bagi pengurus Bank Sampah, diperlukan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan mekanisme kerja yang telah disepakati, termasuk pencatatan tabungan secara transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, bagi pelaksana KKN di masa mendatang, pengalaman program ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis potensi dan partisipasi masyarakat (Asset Based Community Development) dalam merancang program pengabdian yang aplikatif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, disarankan pula agar Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu secara bertahap menjalin kerja sama formal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang persampahan, guna memperoleh pembinaan teknis, akses pasar yang lebih luas untuk hasil sampah anorganik, serta dukungan pelatihan lanjutan dalam pengolahan sampah organik menjadi produk turunan lain, seperti kompos padat atau eco-enzyme, sehingga nilai tambah yang diperoleh masyarakat dapat terus berkembang seiring waktu. Replikasi program ke RT-RT lain di Desa Jatiprahu juga perlu dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan desa yang benar-benar bebas dari praktik pembuangan sampah ke sungai dan pembakaran sampah terbuka secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Moh Nurul Huda, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atas bimbingan dan arahannya selama pelaksanaan program. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Jatiprahu, Ketua RT 17, kader Posyandu, serta seluruh masyarakat RT 17 Desa Jatiprahu atas dukungan, partisipasi, dan kerja sama yang baik selama proses perencanaan hingga peresmian Bank Sampah. Tak lupa, apresiasi disampaikan kepada seluruh anggota kelompok KKN yang turut berkontribusi dalam program ini.

Penulis juga menghargai dukungan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu terlaksananya program ini secara lancar. Semoga program Bank Sampah RT 17 Desa Jatiprahu dapat terus berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menjadi inspirasi bagi program pengabdian masyarakat serupa di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaloke, Meirinda Eka Putri Cahya, and M. Hasan Abdullah. "P PERAN IBU RUMAH TANGGA DALAM KEBERLANJUTAN BANK SAMPAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU." *Seminar Nasional dan Call For Paper 2025 dengan tema "Inovasi Inklusif Gender dalam Sociopreneurship" PSGESI LPPM UWP*. Vol. 12. No. 1. 2025.
- Martiandi, Bagus, Sambas Basuni, and Soeryo Adiwibowo. "Typology and Characteristics of Community-Based Waste Banks in Integrated Agricultural Waste Management Systems in Ciamis Regency: Tipologi dan Karakteristik Bank Sampah dalam Sistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Terintegrasi Agrikultur di Kabupaten Ciamis." *Journal of Global Sustainable Agriculture* (2025): 180-188.
- Oktavilia, Shanty, et al. *Potensi ekonomi sampah*. Penerbit NEM, 2024.
- Satya, Andiyasa Mahardhika, Adellia Mega Pratiwi, and Muhammad Fiqih Samudera Wardhana. "Efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Surabaya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.9 (2025).
- Urfan, Adiyat. *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Kelompok Bank Sampah Ganis Mulyo Di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus*. Diss. IAIN KUDUS, 2023.